



RANCANGAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KATA PENGANTAR

Rancangan Naskah Eksekutif ini merupakan bagian dari dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun. Buku ini berisikan ringkasan dokumen Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan membaca ringkasan eksekutif ini maka secara singkat akan dapat diketahui rencana pengembangan TIK secara menyeluruh untuk 5 tahun mendatang.

KEPALA DINAS,

DIDDY RUSDIANSYAH A D, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19640627 199003 1 006

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	4
II.	VISI, MISI DAN PROGRAM.....	26
III.	GAMBARAN UMUM TIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	32
IV.	STRATEGI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TIK	33
V.	METODOLOGI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TIK.....	33
VI.	TARGET PORTOFOLIO APLIKASI	34
VII.	INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA	35
VIII.	PERAWATAN.....	38
IX.	ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	38
X.	PERATURAN DAN KEBIJAKAN	39
XI.	PENDANAAN.....	40

I. LATAR BELAKANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. GAMBARAN UMUM

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: Tujuan Politik, Tujuan Administratif dan Tujuan Ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang ditetapkan menurut undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah daerah memungkinkan arah pengembangan suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah pada tahun tersebut, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah berjalan sepuluh tahun, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tersebut diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga sekarang.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Otonomi daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan Pemerintah daerah dalam berkreasi dan berekspreasi membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di Provinsi, dilakukan dengan memilih gubernur dan wakil gubernur secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, pasal 64, menyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah wajib menyampaikan visi, misi dan program kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis saat kampanye.

Dan dalam menyusun visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah wajib mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Sebagai Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018-2023, H. Isran Noor - H. Hadi Mulyadi, yang diusung oleh koalisi tiga Partai yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) wajib menyusun Visi, Misi dan Program sebagai materi kampanye yang akan disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur pada kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode 2018 - 2023.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Visi, Misi dan Program Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2018-2023, H Isran Noor - H. Hadi Mulyadi mempedomani Peraturan-peraturan dan dokumen perencanaan daerah, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Istrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036.

C. KONDISI AWAL, ISU STRATEGIS serta HARAPAN dan TUJUAN

1) KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KE-4 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Kondisi awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahap ke-4 merupakan kondisi akhir yang dicapai dari pelaksanaan RPJMD Tahap ke-3. Gambaran kondisi akhir RPJMD Kaltim Tahap ke-3 secara umum yang harus dicapai (sesuai RPJPD) adalah tingkat perkembangan Kalimantan Timur sudah mencapai setara dengan rata-rata Indonesia, serta berbagai kegiatan dan produk unggulan telah sampai atau setara dengan rata-rata Asean. Berdasarkan beberapa sumber meliputi kajian yang disusun oleh Bappeda Kaltim, BPS Kaltim dan TIM Kecil disajikan beberapa kondisi awal sebagai berikut:

a) Kependudukan

Jumlah Penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2017 diperkirakan mencapai angka 3.57 juta jiwa yang menempati pada 7 Kabupaten 3 Kota, 103 kecamatan, 834 desa, dan 198 kelurahan, perkembangan jumlah penduduk Kalimantan Timur hingga tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan yang masih dikategorikan tinggi yaitu 2,24 persen, bahkan masih lebih tinggi

dibandingkan angka rata-rata nasional. Kabupaten/Kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Kutai Timur sebesar 4,28 persen, sedangkan kabupaten/kota lainnya pertumbuhannya berkisar 0,61-2,79 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata.

Pada tahun 2015 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (23,71%), yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (20,95%), Kota Balikpapan (17,96%) dan tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 0,76-9,34 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2010 tidak banyak berubah. Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 98,91 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 52,86 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu 47,14 persen menetap di kota yang luasnya hanya 1,09 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur. Akibatnya kepadatan penduduk di kabupaten hanya berkisar 1-53 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 1.201,72 jiwa/km², Kota Samarinda 1.134,08 jiwa/km², dan Kota Bontang 1.001,13 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 26,91 jiwa/km². Kondisi ini tidak terlepas dari tingginya penduduk migrasi yang masuk ke daerah ini sebagai konsekuensi dari era otonomi, dimana daerah yang masih menjanjikan peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik akan menjadi tujuan migran.

Hal ini di tunjukkan dari jumlah migrasi dan tujuan dari pendatang tersebut yang sebagian besar karena pekerjaan/mencari pekerjaannya itu sebesar 46,7 persen (Survei Penduduk Antar Sensus/ SUPAS2005). Pada tahun 2010 penduduk migrant (seumur hidup) Kalimantan Timur mencapai 44,7 persen, sedangkan migrant (yang masuk 5 tahun antara tahun 2005-2010) ada sebesar 9,2 persen. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan secara absolut maupun secara persentase mengalami kenaikan. Selama periode September 2016 - Maret 2017 penduduk miskin di daerah

perkotaan naik sebanyak 4,41 ribu orang atau secara persentase naik 0,13 persen dan di daerah pedesaan naik sebanyak 4,52 ribu orang atau secara persentase naik 0,35 persen. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2017 dan September 2016 masing-masing sebesar 10,50 persen dan 10,15 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 3,99 persen pada bulan Maret 2017 dan 3,86 persen pada bulan September 2016.

Tabel-1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur

Penduduk Miskin	2013*	2014*	2014*	2015	2015	2016	2016	2017
	Sept	Maret	Sept	Maret	Sept	Maret	Sept	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah (ribuan)	255,91	253,60	252,68	212,89	209,99	212,92	211,24	220,17
Persentase	6,38	6,42	6,31	6,23	6,10	6,11	6,00	6,19
Garis Kemiskinan (000Rp/Kapita/Bln)	417,90	431,56	444,25	473,71	494,21	511,21	526,86	536,48

Catatan : * Kaltim Termasuk Kaltara

Jumlah Penduduk miskin di Kalimantan Timur sebanyak 211.240 orang pada tahun 2016, atau 6,00 persen dari total jumlah penduduk Kalimantan Timur, tercatat garis kemiskinan setinggi Rp. 511.205 per kapita per bulan. Dari lima provinsi di Kalimantan, Kalimantan Timur Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi ketiga setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.

Tabel-2. Penduduk Miskin di Kalimantan 2017

Provinsi	Pend, Miskin (000 Jiwa)	Persentase Pend,Miskin (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ bln) perkotaan	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ bln) perdesaan	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	390,32	8,0	366 477	360 940	0,24
*Kalimantan Tengah	139,16	5,37	373 219	414 002	0,23
Kalimantan Selatan	184,16	4,52	399 162	380 647	0,16
*Kalimantan Timur	220,17	6,19	555 580	532 719	0,21
*Kalimantan Utara	49,47	7,22	562 937	537 246	0,34
Indonesia	27 764,32	10,96	372 144	350 420	0,44

Kondisi petani masih memprihatinkan karena indeks nilai tukar petani (NTP) masih dibawah nilai 100 persen, dan bahkan tahun 2016 terjadi penurunan, NTP bernilai 98,14 persen.

Tabel-3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NTP Gabungan	98,74	98,04	95,30	99,93	98,61	98,14
NTP Tanaman Pangan	88,42	89,16	86,90	96,41	95,29	96,61
NTP Hortikultura	111,87	106,90	101,55	96,65	93,28	92,03
NTP Perkebunan	107,01	109,80	104,45	102,24	102,99	99,01
NTP Peternakan	116,43	116,11	114,72	104,02	102,79	104,78
NTP Perikanan	90,67	88,98	88,98	101,46	98,38	99,89

Catatan: - Kaltim termasuk Kaltara

b) Kualitas Sumber Daya manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah dapat diukur dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tersebut. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat. Semakin tinggi angka IPM suatu negara atau daerah maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia negara dan daerah tersebut. Angka IPM dibawah 70 termasuk angka IPM suatu negara dan daerah terkebelakang. IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah mencapai 74 tetapi belum merata di seluruh Kabupaten/Kota. IPM yang tinggi didominasi oleh wilayah perkotaan, sedangkan wilayah kabupaten masih lebih rendah. Ada tiga kabupaten yang masih memiliki angka IPM dibawah angka 70,00, yaitu Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu.

Oleh karena itu perlu upaya maksimal Pemerintah Provinsi merealisasikan pemerataan pembangunan SDM di seluruh Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Pemerintah masih menghadapi tugas berat untuk meningkatkan pendidikan formal masyarakat, karena rata-rata lama sekolah baru mencapai 9,2 tahun, artinya maksimal lulus SMP. Dari sisi lama sekolah, tertinggi Samarinda mencapai angka 14,23 tahun, rata-rata lama sekolah diperkotaan mencapai 10,00 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah di

kabupaten berkisar pada angka 8,00 tahun, dan terendah di Mahakam Ulu setinggi 7,37 tahun.

Kualitas SDM yang masih memiliki kualitas rendah sehingga sulit bersaing untuk mendapatkan peluang kerja. jumlah Penduduk Angkatan Kerja Kaltim tahun 2016, sebesar 1.717.892 orang, pencari kerja dengan pendidikan SMA mencapai 64 persen dari total pencari kerja.

Tabel-4. Angkatan Kerja & Pengangguran Kalimantan Timur

Indikator	2014 ^{*)}	2015	2015	2016	2016	2017
	Agust	Feb	Agust	Feb	Agust	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk usia kerja (ribuan)	2 825,46	2 431,60	2 467,51	2 498,28	2 534,11	2.565.035
Angkatan kerja (ribuan)	1 811,13	1 648,84	1 539,49	1 650,38	1 717,89	1.678.913
- Bekerja	1 677,47	1 530,59	1 423,96	1 504,13	1 581,24	1.535.296
- Pengangguran	133,66	118,25	115,53	146,24	136,65	143.617
Bukan Angkatan Kerja	1 014,34	782,76	928,02	847,90	816,22	886.122
TPAK (%)	64,10	67,81	62,39	66,06	67,79	65,45
TPT (%)	7,38	7,17	7,50	8,86	7,95	8,55

Catatan : - *) Kaltim termasuk Kaltara

Lembaga pendidikan yang berada di Kalimantan Timur dan sekolah menengah kejuruan masih belum memadai dan belum memenuhi akreditasi untuk menjawab persoalan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kalimantan Timur menghadapi berbagai persoalan, yakni memiliki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di regional Kalimantan, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, dan rendahnya daya serap tenaga kerja.

Tabel-5. Penduduk Bekerja Menurut Sektor Kalimantan Timur

Sektor	2012 ^{*)}	2013 ^{*)}	2014 ^{*)}	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	Agust	Agust	Feb
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	459,1	432,3	467,0	320,3	345,5	337.960
Pertambangan	161,9	164,2	174,4	135,4	130,1	103.822
Industri Pengolahan	96,8	88,0	102,9	78,9	100,3	67.979
Listrik, gas & air bersih	6,2	5,1	3,7	9,9	2,1	13.248
Konstruksi	104,9	117,7	101,0	101,2	92,9	75.164
Perdagangan/hotel	347,7	350,9	373,1	346,8	418,8	442.685
Pengangkutan & Kom.	73,7	91,2	81,7	87,6	85,8	70.572
Keuangan	54,4	63,1	55,3	58,1	73,4	70.030
Jasa-jasa	314,4	311,8	318,3	285,7	332,3	353.836

*) Kaltim termasuk Kaltara

Angka harapan hidup Kalimantan Timur mencapai angka rata-rata 73,68. Namun angka harapan hidup di Kabupaten, dibawah angka 73,68, hal ini perlu mendapat perhatian.

Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk. Tenaga kesehatan sangat tidak merata karena terpusat di perkotaan dan beberapa kabupaten yang telah berkembang. Demikian juga terjadi ketimpangan ketersediaan sarana kesehatan perkotaan dengan kabupaten.

c) Perekonomian Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur dalam 4 tahun (2013-2016) mengalami penurunan, dan nilai LPE Kalimantan Timur dalam 4 tahun (2013-2016) menduduki peringkat terendah dibanding provinsi lainnya di regional Kalimantan.

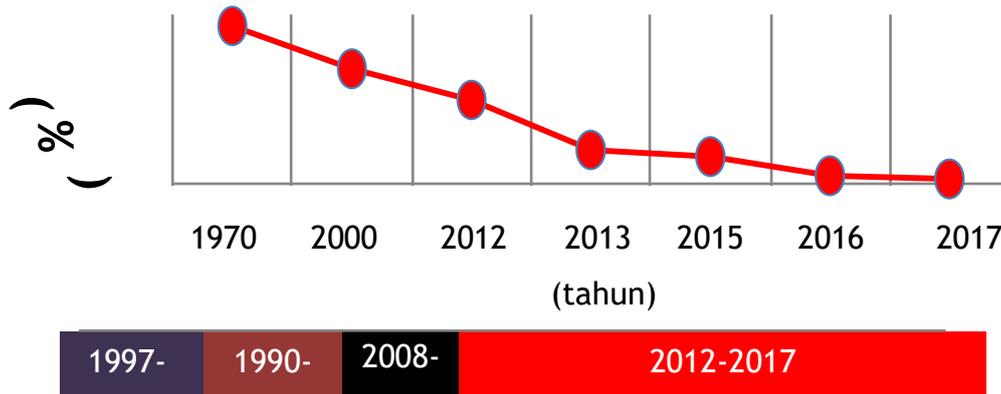
Tabel-6. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi / Indonesia	2013	2014	2015	2016
----------------------	------	------	------	------

1. Kalimantan Timur	2,76%	1,71%	-1,21%	-0,38%
2. Kalimantan Barat	6,05%	5,03%	4,86%	5,22%
3. Kalimantan Selatan	5,33%	4,84%	3,83%	4,38%
2. Kalimantan Tengah	7,37%	6,21%	7,01%	6,36%
5. Kalimantan Utara	-	8,18%	3,4%	3,75%
6. Indonesia	5,71%	5,21%	4,99%	5,16%

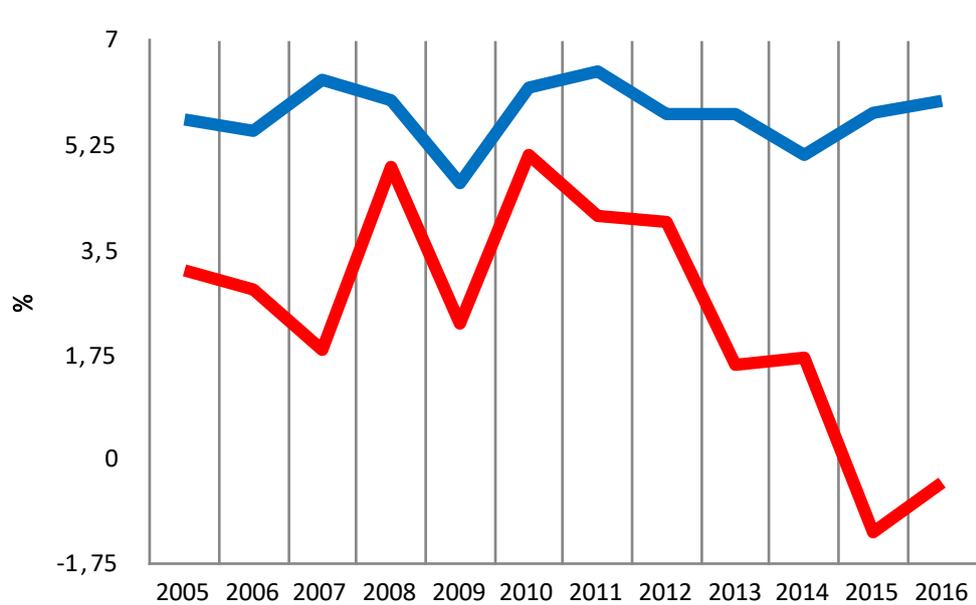
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kaltim dengan mengandalkan sumber daya alam kayu, minyak dan gas, batubara tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kaltim bahkan LPE Kaltim semakin terpuruk. Untuk lebih jelasnya trend LPE Kaltim tahun 1970-2017, tiap tahun dapat dilihat pada grafik-1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 1970-2017.

Grafik-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur 1970-2017



LPE Kalimantan Timur mengalami tekanan hingga penurunan sejak tahun 2005 di bawah rata-rata LPE Nasional. Bahkan LPE Kalimantan Timur menurun di bawah minus sejak tahun 2015 hingga sekarang.

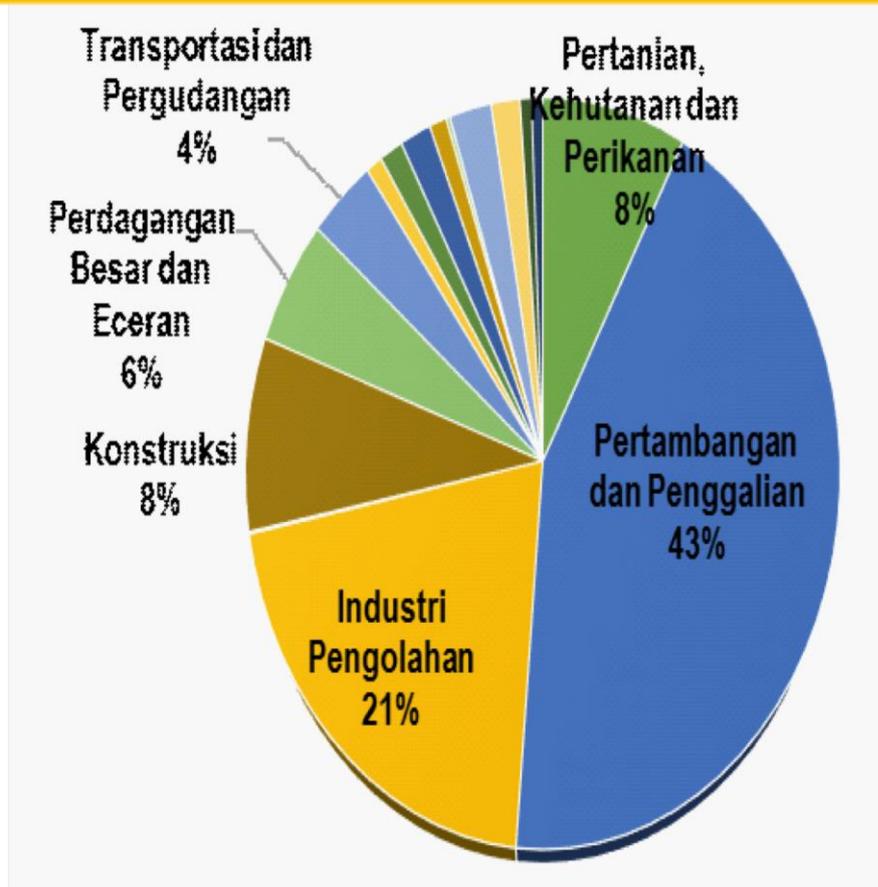
Grafik-2. LPE Kalimantan Timur dan Nasional 2005-2017



Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur tahun 2016 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sebesar 43,34%, sedangkan kontribusi berikutnya adalah sektor pengolahan sebesar 20,51%, sektor konstruksi sebesar 8,35%, sektor Pertanian - Kehutanan - Perikanan sebesar 8,06%, sektor perdagangan besar dan eceran, mobil dan sepeda motor sebesar 5,55%.

Grafik-3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016.

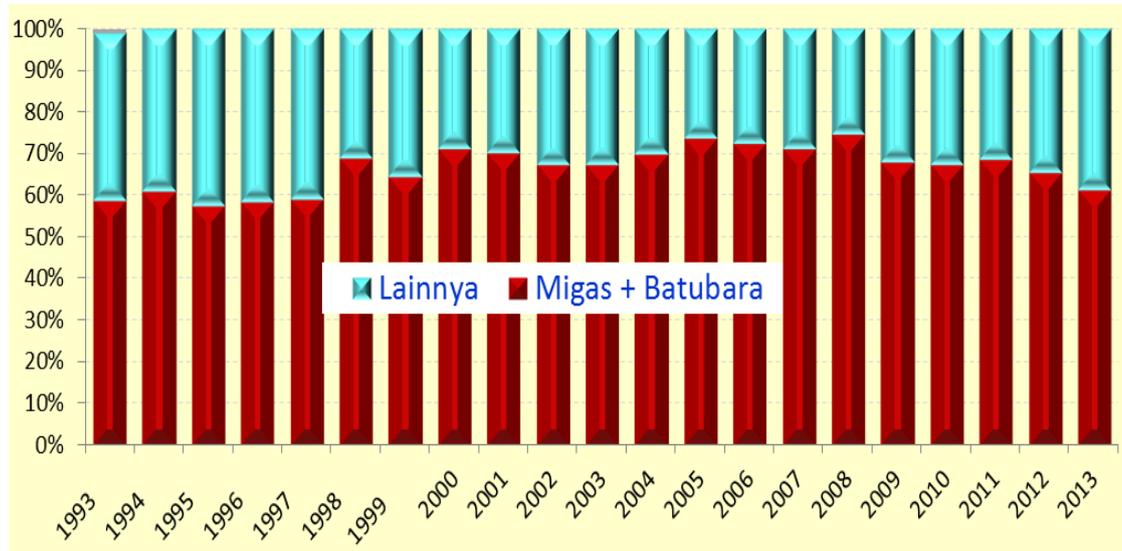
DISTRIBUSI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016



Untuk Kabupaten/Kota kontribusi sektor tambang terbesar berada di Kabupaten Kutai Timur sebesar 79,23% dan Paser sebesar 71,31%. Sedangkan industri pengolahan terbesar berada di wilayah Bontang sebesar 83,96%, dan Balikpapan sebesar 47,62%. Rendahnya nilai industrialisasi dan pengolahan menjadi indikasi belum beroperasinya hilirisasi baik dari sektor tambang maupun sektor pertanian kehutanan dan perikanan.

Perekonomian Kalimantan Timur yang masih didominasi dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan memberikan PDRB yang tinggi, namun memiliki kerapuhan atas harga dan permintaan pasar global, menyebabkan rentannya target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Grafik-4. Peranan Pertambangan Non Migas, Migas Dan Industri Migas Dalam PDRB Kaltim Tahun 1993 - 2013.



Sumber : BPS Kaltim & BAPPEDA Kaltim

Terlihat jelas bahwa rata-rata lebih dari 60 % Ekonomi atau PDRB Kaltim disumbang oleh minyak, gas dan batubara. Sementara wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi di luar sektor non migas pertambangan yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap sektor primer.

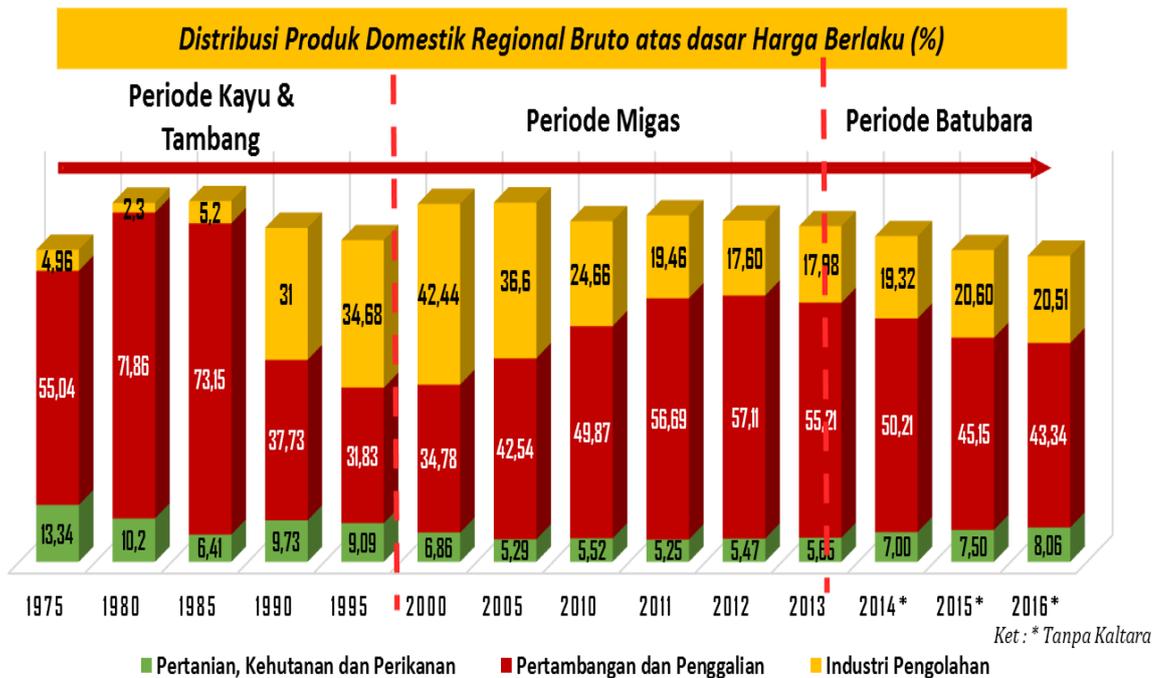
Tabel-7. Perkiraan Struktur Ekonomi Kalimantan Timur 2005 - 2025

NO	LAPANGAN USAHA	2001	2005	2010	2015	2020	2025
	Kelompok Sektor Primer	32.42	32.72	33.29	33.47	33.63	33.73
1	Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan	6.64	6.75	12.55	16.40	18.34	21.30
2	Pertambangan dan Penggalian	25.78	25.96	20.74	17.06	15.29	12.43
	Kelompok Sektor Sekunder	41.72	39.28	39.88	39.60	39.58	39.57
3	Industri Pengolahan	35.14	32.66	33.43	33.28	33.31	33.34
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.19	0.25	0.27	0.28	0.28	0.29
5	Bangunan	6.38	6.37	6.18	6.04	5.98	5.95
	Kelompok Sektor Tersier	10.52	11.17	10.05	10.24	10.09	9.98
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.61	5.56	5.42	5.31	5.26	5.23
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.93	3.19	2.71	2.50	2.38	2.30
8	Keuangan, Persewaan dan	0.30	0.33	0.26	0.24	0.22	0.21
9	Jasa-Jasa	1.67	2.09	1.66	2.20	2.23	2.24

Sumber : RPJPD Kaltim 2005 - 2025

Dari Tabel-7 Perkiraan Struktur Ekonomi diatas diharapkan porsi kontribusi PDRB Sektor primer: bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan, tahun 2018 diperkirakan sudah terjadi transformasi mencapai porsi diatas 16,4 persen dari PDRB, namun realisasi kontribusinya masih sekitar 8,06 persen tahun 2016.

Grafik-5. Distribusi PDRB Kaltim Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 1975-2016 (persen)



Sumber : BPS Kaltim & BAPPEDA Kaltim

Realisasi pendapatan Pemerintah Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan menurun, khususnya dalam tiga tahun terakhir, yaitu periode 2014 - 2016. Pendapatan Asli Daerah menurun dari Rp. 5,77 trilyun menjadi Rp. 3,92 trilyun, pajak daerah semula Rp. 4,87 trilyun menjadi Rp. 2,94 trilyun. Demikian juga terjadi penurunan pada penerimaan dari dana perimbangan, dana bagi hasil pajak/ bukan pajak dan sumber daya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus

d) Pemanfaatan Lahan

Hutan lindung di Kaltim memiliki potensi untuk mempertahankan kesehatan ekosistem hutan dan sebagai kawasan penyangga. Tercatat

Kawasan hutan lindung sebesar 1,845 juta hektar, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 438,3 ribu hektar, hutan produksi sebesar 6,061 juta hektar. Potensi jasa lingkungan harus terus dikembangkan sebagai salah satu pola pengelolaan lingkungan berkelanjutan, konservasi, dan daya dukung lingkungan. Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur telah menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan Kalimantan Timur Rata-rata sebesar 70.039 ha/tahun, dan degradasi sebesar 16.236 ha/tahun.

Peruntukan ruang wilayah Kalimantan Timur untuk kawasan pertambangan, terutama tambang batubara, sebesar 5.227.136 hektar, sebagian masuk dalam kawasan budidaya dan hutan lindung. Luas konsesi pertambangan batubara di Kalimantan Timur mencapai 5.227.136 hektar, lahan terganggu seluas 103.072,80 hektar, yang telah direklamasi sebesar 41.541,58 hektar, yang telah di-revegetasi sebesar 37.950,02 hektar. Luasan lahan terbuka dan terganggu semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel-8. Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur

No	Klasifikasi	KETERANGAN KAWASAN BERDASARKAN SK. 718/Menhut-II/2014							
		APL	HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	Tubuh Air	Grand Total
1	Sangat Kritis	289.89	9.52	1,229.20	22.07	1,043.41		8.17	2,602.26
2	Kritis	25,821.84	2,127.98	118,148.38	2,498.65	6,143.71	4,690.83	128.92	159,560.31
3	Agak Kritis	1,883,855.67	492,302.25	1,750,976.40	73,724.33	1,573,410.71	167,395.57	4,433.64	5,946,098.58
4	Potensial Kritis	1,849,279.38	1,138,884.54	394,640.71	12,730.71	815,264.53	252,702.84	24,271.75	4,487,774.46
5	Tidak Kritis	536,691.51	146,493.99	759,729.60	31,462.53	482,534.33	13,481.51	65,918.54	2,036,312.01
6	No Data	4,021.08	65,844.15	2,375.47	0.03	29,858.63	119.58	1,038.10	103,257.03
Grand Total		4,299,959.37	1,845,662.44	3,027,099.77	120,438.31	2,908,255.33	438,390.32	95,799.12	12,735,604.65

Sumber: SK Menhut 718/Menhut-II/2014

e) Pembangunan Infrastruktur

Kalimantan Timur masih membutuhkan infrastruktur jalan untuk membuka keterisolasian wilayah dan mempercepat arus barang dan jasa, serta perputaran manusia. Sementara kondisi jalan yang rusak sedang, rusak, dan rusak berat sepanjang tahun 2012 hingga 2016 mencapai 41 persen.

Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi masih belum sepenuhnya berbasis pada pengembangan ekonomi kewilayahan. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi dimasing-masing wilayah tidak berkembang maksimal. Hingga saat ini warga Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang pada waktu kemarau menghadapi krisis kebutuhan air bersih, karena waduk atau embung yang menjadi penampungan air terbatas, sementara air melimpah pada alur sungai yang bebas pasang-surut.

Pemerintah perlu keberanian untuk membangun pipa transmisi ke Sungai Mahakam untuk membebaskan krisis air baku bagi ketiga warga kota tersebut. Pelabuhan Teluk Balikpapan memiliki nilai strategis kedepan untuk dikembangkan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional, maka perlu komitmen pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan pelabuhan ini. Pembangunan masih belum merata, dan masih banyak desa yang belum tersentuh penerangan dari sumber Listrik. Pemerintah berikutnya harus berupaya keras dan komitme mengembangkan sumber listrik di seluruh Desa berbasis potensi lokal

f) Lingkungan Hidup

Masih terjadi pencemaran sungai yang diakibatkan kegiatan pertambangan batubara yang membuang air asam tambang langsung ke sumber air permukaan yang menuju ke sungai, dan tidak melakukan pengelolaan air asam tambang dengan membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Status mutu air berdasarkan perhitungan metode Indeks Pencemaran menunjukkan bahwa kondisi Sungai Mahakam pada tahun 2016 dalam keadaan tercemar ringan, dengan rata-rata indeks pencemaran (IP) sebesar 3,34 (rentang nilai IP maksimum = 3,58, minimum = 2,87). Pada beberapa titik pertemuan anak sungai dengan sungai Mahakam mutu air cenderung semakin memburuk.

Hal ini, kedepan Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota harus lebih serius melakukan pembinaan dan pengawasan serta upaya mitigasi atas baku mutu air anak sungai dan sungai Mahakam, sehingga kualitas air sungai sesuai dengan kelas dan peruntukannya. Isu prioritas lingkungan hidup yang harus mendapat perhatian yang masih membutuhkan

perhatian dan penyelesaian, yakni dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim, ancaman terhadap Kawasan Ekosistem Karst Sangkulirang - Mangkaliat, dampak akibat kegiatan pertambangan batubara.

g) Tata Kelola Pemerintahan

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi diukur dari jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh BPK dan hasil temuan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Dalam periode berjalan ini masih terdapat sejumlah temuan kesalahan dan kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini masih dibutuhkan upaya lebih serius dalam menerapkan implementasi SIMDA, SAKIP, pelayanan publik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Terkait pengelolaan keuangan daerah masih belum sepenuhnya menerapkan penyusunan APBD berbasis kinerja.

Menjadi tantangan Pemerintah untuk sepenuhnya menyusun APBD yang akuntabel, konsisten dan menerapkan penuh dokumen rencana yang meliputi: penentuan skala prioritas program dan kegiatan menurut kebutuhan masyarakat tiap bidang, penentuan alokasi belanja berdasar skala prioritas sesungguhnya, serta analisis antara *input-process-outputoutcome-impact*. Masih banyak potret kondisi saat ini, yang merupakan hasil akhir dari seluruh tahapan pembangunan jangka menengah 5 tahunan sebelum tahun 2018, yang tidak mungkin dituliskan pada naskah visi, misi dan program, namun sudah terekam seluruhnya untuk pelengkap dalam penyusunan RPJMD Kaltim 2018-2023.

2) PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR JANGKA PANJANG (ISU STRATEGIS)

Dari Diskusi intensif dengan Kelompok Pakar dengan Tim Kecil Pemenangan H. Isran Noor - H. Hadi Mulyadi, mengidentifikasi permasalahan utama dan solusi pembangunan di Kalimantan Timur, sebagai berikut

- (1) Membangun Provinsi pada dasarnya adalah membangun sinergitas antar wilayah kabupaten dan kota untuk mencapai kesejahteraan yang

didukung oleh potensi ekonomi sumberdaya wilayah yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang.

- (2) Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya ekonomi wilayah berkelanjutan sebagai basis ekonomi wilayah yaitu produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri berbasis pertanian dan energi baru terbarukan.
- (3) Potensi sumberdaya alam yang tidak terbarukan masih menjadi sebagai pendukung ekonomi wilayah Kaltim, sehingga terjadi “*trade off*” pembangunan.
- (4) Kekeliruan pembangunan wilayah mengakibatkan pada kerusakan sistem lingkungan yang lemahnya kekuatan ekonomi.
- (5) Pertumbuhan ekonomi Kaltim berada pada titik yang terendah dibandingkan provinsi lainnya, oleh karena mengandalkan ekonomi pada sektor yang tidak terbarukan

Disisi lain permasalahan pembangunan atau isu strategis pembangunan yang muncul selama periode Pembangunan Kalimantan Timur dari waktu ke waktu, pelaksanaan 3 (tiga) Tahap RPJMD Kalimantan Timur, teridentifikasi ada 5 permasalahan dan kami temukan satu masalah, yakni KEPEMIMPINAN. Keseluruhan permasalahan atau isu strategis pembangunan tersebut, yakni :

- (1) Rendahnya Daya Saing SDM Provinsi Kalimantan Timur;
- (2) Transformasi Ekonomi yang belum sepenuhnya mampu diunggulkan (belum terjadi tranformasi khususnya melihat kontribusi PDRB sektor SDA terbarukan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan);
- (3) Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui pembangunan di bidang infrastruktur;
- (4) Penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
- (5) Pemerintahan Daerah yang belum mencapai kinerja prima dan akuntabel terutama dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi tata kelola pemerintahan, implementasi peraturan perundangan-undangan dan dalam hal prioritas pembangunan daerah.

3) TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Arah Pembangunan di Kalimantan Timur tidak boleh terlepas dan wajib mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Jangka Menengah Nasional. Tujuan akhir pembangunan nasional Indonesia, periode 2014-2019, dapat dilihat dari visi Kepala Negara, karena visi menggambarkan suatu keadaan yang ingin diwujudkan dari akhir 5(lima) tahun pembangunan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Pemerintah Jokowi-JK merumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Selain visi Jokowi-JK, pembangunan Kaltim 2018-2023 wajib mempedomani juga Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kaltim 2005-2025. Visi RPJPD Kaltim adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Yang Adil dan Sejahtera Dalam Pembangunan Berkelanjutan “

Penjelasan atas visi RPJPD Kaltim 2005 - 2025 tersebut sebagai berikut:

- Masyarakat yang adil adalah masyarakat Kalimantan Timur yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat, serta mengutamakan kepentingan rakyat dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berlandaskan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat Kalimantan Timur yang terpenuhi hak-hak sipil dan politik, dan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya.
- Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan Kalimantan Timur yang didasarkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara cermat, bijaksana, dan berhati-hati dengan mengutamakan

keseimbangan dan kelestarian; serta memperhatikan kepentingan generasi yang mendatang.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi RPJPD Kaltim 2005-2025 sebagai berikut

- (1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
- (2) Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
- (3) Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
- (4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
- (5) Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam membuat rancangan visi Kepala Daerah, maka perlu juga melihat tujuan atau cita-cita akhir pembangunan Kab/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, dengan cara mengenali kata kunci pada visi mereka, ditemukan umumnya (normatif) memiliki kata kunci : sejahtera, mandiri, maju, adil, agroindustri, berwawasan lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sebagai Badan yang bertanggungjawaban atas perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Kaltim telah menyiapkan dan menyusun arahan visi pembangunan (teknokratik) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023, berdasarkan permasalahan, isu strategis, dan kata kunci visi RPJMN dan Kab/Kota se-Kaltim, BAPPEDA Kaltim merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Timur yang Aman, Adil, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Hilirasi dan Ekonomi Kreatif”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan (teknokratik) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 disusun arahan misi sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing;
- (2) Memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan berkerakyatan;

- (3) Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui infrastruktur daerah yang handal;
- (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik
- (5) Memelihara kelestarian lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan

Peraturan mengamanahkan bahwa dalam merancang visi, misi, dan program kepala daerah, wajib mempedomani RPJPD. Bagian utama dari RPJPD Kaltim yakni mengenai gambaran suatu kondisi/keadaan akhir atas pelaksanaan RPJMD tahap ke-4 yang diharapkan. Pada Pembangunan Jangka Menengah Tahap ke-4 (keempat) Propinsi Kalimantan Timur yang akan segera dilaksanakan, periode 2019-2023, suatu kondisi/keadaan Kalimantan Timur yang dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya saing daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup ASEAN, bahkan pada beberapa sektor pembangunan diharapkan mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific.

TAHAPAN RPJPD 2005-2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008



Gambar-1. Tahapan RPJPD Kaltim 2005 - 2025

Sumber : BAPPEDA Kaltim

Pada Akhir periode ini, diharapkan Kalimantan Timur secara umum sudah memiliki kualitas sumberdaya manusia yang bermartabat atau memiliki karakter moral dan agama yang tinggi dengan tingkat pendidikan keahlian dan keterampilan yang memadai, perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau ke segenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi, diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang yang harmonis menjadi acuan pengembangan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi. Sehingga pada tahap ke-4 dari RPJP Provinsi Kalimantan Timur tersebut bermakna bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sudah harus memiliki kedaulatan, kemampuan dan kemandirian untuk memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk mensejahterakan rakyat.

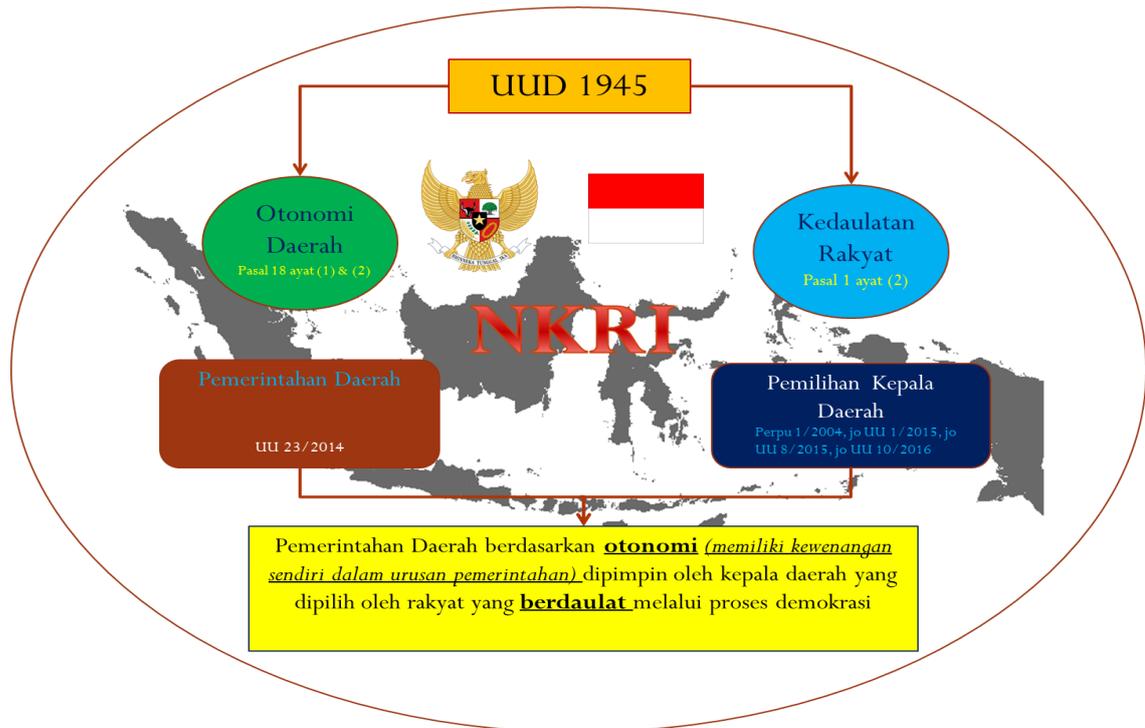
II. VISI, MISI DAN PROGRAM

A. OTONOMI DAERAH DAN KEDAULATAN RAKYAT

Bangsa Indonesia mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan harapan proklamator negeri ini, maka perlu ditelusuri terlebih dahulu tentang nilai-nilai hakiki kedaulatan atas bangsa ini. Dasar konstitusi yang mengatur hubungan antara kedaulatan negara dengan warga negaranya antara lain dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Dengan demikian rakyat yang berdaulat adalah yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan. Namun tentunya rakyat tidak dapat langsung memimpin negeri ini tanpa legitimasi yang disepakati bersama untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan.

Oleh karenanya untuk menentukan pemegang mandat kedaulatan tersebut dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui proses yang demokratis. Bentuk pengakuan kedaulatan di tangan rakyat sebagai makna hakiki demokrasi.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pemerintahan daerah untuk lebih partisipatif dan berdaulat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai potensi dan ciri khas daerah masing-masing, karena Kepala Daerah yang telah terpilih oleh rakyat yang berdaulat memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan masa depan kemajuan daerahnya mengikuti potensi dan ciri khas daerah, serta kebutuhan pembangunan daerah. Inilah kami maksud dengan pemerintahan daerah yang berdaulat dalam bingkai NKRI.



Gambar-2. Bagan Kerangka Pikir Otonomi Daerah dan Kedaulatan Rakyat

Dengan mempertimbangkan kondisi Kalimantan Timur saat ini, tantangan 5 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan harapan seluruh pemangku kepentingan, dan menjaga kesinambungan dan kesesuaian Pembangunan Propinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025, serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, serta memperhatikan capaian pembangunan Kalimantan Timur saat ini dan beratnya tantangan pembangunan yang dihadapi untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 2018-2023, maka dibutuhkan **PEMIMPIN YANG BERANI** untuk **MEWUJUDKAN KALIMANTAN TIMUR YANG BERDAULAT**. “Kalimantan Timur Yang Berdaulat” dimaknai bahwa rakyat Kalimantan Timur harus memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2018-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur

yang berdaulat, dengan merumuskan Visi Pembangunan Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu:

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemandirian, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Lebih rinci dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut :

- (1) Kalimantan Timur mampu memiliki kemantapan dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik;
- (2) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- (3) Kalimantan Timur mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alamnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (4) Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki daya saing;

BERDAULAT sendiri memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus online. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, kami artikan pula untuk menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi Berdikari, SejahtERA, DAMai, unggUL, dan kuAT.

B. RUMUSAN MISI PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR 2018-2023

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama:

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, harmonisasi dengan pemerintahan kabupaten/kota, pelayanan publik yang prima, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel,

serta berperan aktif dalam penegakan hukum demi terwujudnya keadilan sosial;

Misi Kedua:

Berdaulat dalam penerapan regulasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendorong lahirnya industri hilir serta mewujudkan ketahanan energi untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur;

Misi Ketiga:

Berdaulat dalam pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di seluruh daerah Kalimantan Timur untuk pemerataan, interkoneksi dan harmonisasi antar daerah Kabupaten/Kota sehingga menjamin kelancaran arus barang dan jasa serta iklim investasi daerah yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur, rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW) untuk memberikan jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ekosistem;

Misi Keempat:

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, jasa dan pariwisata dengan memberikan bantuan modal usaha, pendampingan teknis dan manajerial, serta bantuan pemasaran pada usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kemandirian usaha;

Misi Kelima:

Berdaulat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan komoditas agroindustri unggulan dan andalan yang strategis, perikanan dan kelautan, peternakan serta mewujudkan ketercukupan sandang dan papan;

Misi Keenam:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia dengan penerapan pendidikan agama dan moral dalam sistem pendidikan yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi untuk

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing;

Misi Ketujuh:

Berdaulat dalam pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dengan memberikan ruang partisipasi yang seluas-luasnya serta meningkatkan prestasi Olah Raga dan Seni Budaya hingga tingkat Internasional;

Misi Kedelapan:

Berdaulat dalam pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan tata guna lahan, pengurangan emisi dan perubahan iklim sehingga terwujud peningkatan kualitas lingkungan hidup;

C. PROGRAM PRIORITAS KALIMANTAN TIMUR 2018-2023

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi, disusun aksi berupa program prioritas pembangunan Kalimantan Timur Periode 2018-2023 yakni :

MISI 1 : Pemerintahan & Pelayanan Publik

- (1) Harmonisasi dan Sinkronisasi Pemerintah Provinsi dan Kab/ kota*
- (2) Memberikan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kepada Pemda Kab/kota dalam urusan-urusan strategis*
- (3) Memudahkan perizinan yang terkait dengan provinsi agar dapat diselesaikan di Pemerintah Kab/Kota*

MISI 2 : Pengelolaan SDA, Industri & Tenaga Kerja

- (1) Penerapan regulasi eksploitasi SDA Kaltim*
- (2) Penerapan tata niaga BBM di seluruh wilayah Kaltim melalui Perusda.*
- (3) Membuka 250.000 lapangan kerja baru sektor industri hilir migas dan pertambangan.*

MISI 3: Insfrastruktur, Energi & Informasi

- (1) Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi kelas 1 berbasis ekonomi kewilayahan.*
- (2) Penyediaan Listrik di seluruh Desa berbasis potensi lokal.*
- (3) Membangun akses telekomunikasi dan internet di pusat Desa.*

- (4) *Pembangunan pipa transmisi air baku Sungai Mahakam untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda*
- (5) *Peningkatan Pelabuhan Internasional Teluk Balikpapan menjadi Pelabuhan Ekspor Internasional.*
- (6) *Rasionalisasi dan harmonisasi penataan ruang (RTRW)*

MISI 4 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan

- (1) *Meningkatkan PAD hingga sebesar Rp. 32 T melalui peningkatan hasil usaha daerah.*
- (2) *Modal usaha 100 Milyar pertahun tanpa jaminan bagi usaha kecil dan menengah dengan pola pendampingan.*
- (3) *Meningkatkan peran BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa*
- (4) *Pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan potensi daerah*

MISI 5: Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang & Papan

- (1) *Mencetak 1 juta Ha lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat.*
- (2) *Membangun 10 Sentra Perikanan Mandiri disepanjang pantai dan danau Kaltim untuk mewujudkan nelayan sejahtera.*
- (3) *Mempermudah investasi Usaha dan Industri Pertanian*
- (4) *Bantuan 25.000 rumah layak huni untuk keluarga pra sejahtera.*

Misi 6: SDM

- (1) *Membangun SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School) di setiap Kab/Kota.*
- (2) *Menyalurkan 6.500 per tahun Bea Siswa Kaltim Tuntas untuk melahirkan Sarjana Membangun Desa.*
- (3) *Memaksimalkan SMK dan membuka BLK untuk mencetak 150.000 tenaga kerja handal.*
- (4) *Mengembalikan fungsi dan pengelolaan RSI Samarinda.*
- (5) *Pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem pendidikan jarak jauh (Distance Learning System)*
- (6) *Meningkatkan insentif guru dan tenaga kependidikan SMA/ SMK/MA negeri dan swasta untuk memenuhi standar upah minimum serta memberikan tambahan tunjangan kemahalan bagi guru dan tenaga kependidikan di daerah terpencil/perbatasan.*

- (7) *Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK/ MA memenuhi standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan.*
- (8) *Meningkat Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah sakit Type C.*
- (9) *Memberikan tunjangan kemahalan bagi dokter dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan*
- 10) *Pemberian santunan bagi lansia keluarga pra sejahtera*

MISI 7: Perempuan, Pemuda & Disabilitas

- (1) *Pemberian modal usaha bagi kelompok usaha perempuan, pemuda dan Penyandang Disabilitas*
- (2) *Peningkatan kapasitas perempuan, pemuda dan Disabilitas*
- (3) *Pemberian insentif bagi atlet dan pekerja Seni yang mencapai prestasi ditingkat Internasional.*
- (4) *Optimalisasi sarana dan prasarana Olahraga yang telah terbangun.*
- (5) *Menjadikan Anjungan Kaltim di TMII sebagai sekolah seni budaya Kaltim.*

MISI 8: Lingkungan Hidup

- (1) *Pemberian bantuan keuangan untuk prioritas penanganan banjir di kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang.*
- (2) *Meminimalisir kerusakan dan kebakaran hutan*
- (3) *Rehabilitasi 492 ribu Ha Hutan Lindung*
- (4) *Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara*
- (5) *Pengerukan Danau Jempang, Semayang dan Melintang untuk pengendalian banjir, perikanan dan pariwisata.*

III. GAMBARAN UMUM TIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kondisi TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Saat Ini Implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara umum sudah cukup baik terbukti dengan telah diraihnya penghargaan ICT Pura. Sebagian besar SKPD/OPD sudah mengimplementasikan TIK untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan survey diketahui bahwa sudah terdapat 74 aplikasi yang sudah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur. Beberapa SKPD/OPD juga telah mengembangkan jaringan komputer lokal yang dilengkapi dengan fasilitas internet. Akan tetapi masih dijumpai beberapa permasalahan yang perlu diatasi sehingga implementasi TIK dapat lebih maksimal. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi selama survey yang dilakukan tim penyusun Rencana Induk Pengembangan TIK ini antara lain: kecepatan layanan internet yang terbatas di beberapa SKPD/OPD, faktor keamanan data yang kurang diperhatikan, antar SKPD/OPD tidak terhubung dalam sebuah jaringan intranet, belum terintegrasinya data, jumlah SDM TIK yang masih terbatas, dan keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur TIK

IV. STRATEGI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TIK

Strategi yang perlu diterapkan untuk mendukung keberhasilan implementasi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dibagi menjadi 4 strategi yaitu:

(1) Strategi Optimasi Pengguna

Strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan TIK dari segi pengguna TIK.

(2) Strategi Pelayanan TI

Strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan TIK.

(3) Strategi Integritas Data dan Sistem

Strategi yang diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai data dan sistem yang diimplementasikan.

(4) Strategi Manajemen Sumber Daya

Strategi yang diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya TIK.

V. METODOLOGI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TIK

Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan Rencana Induk Teknologi Informasi meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Survei lapangan. Dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara serta pengamatan untuk mengumpulkan sejumlah data penunjang.

(2) Penyusunan model kebutuhan informasi

(3) Penyusunan kebutuhan aplikasi mendatang

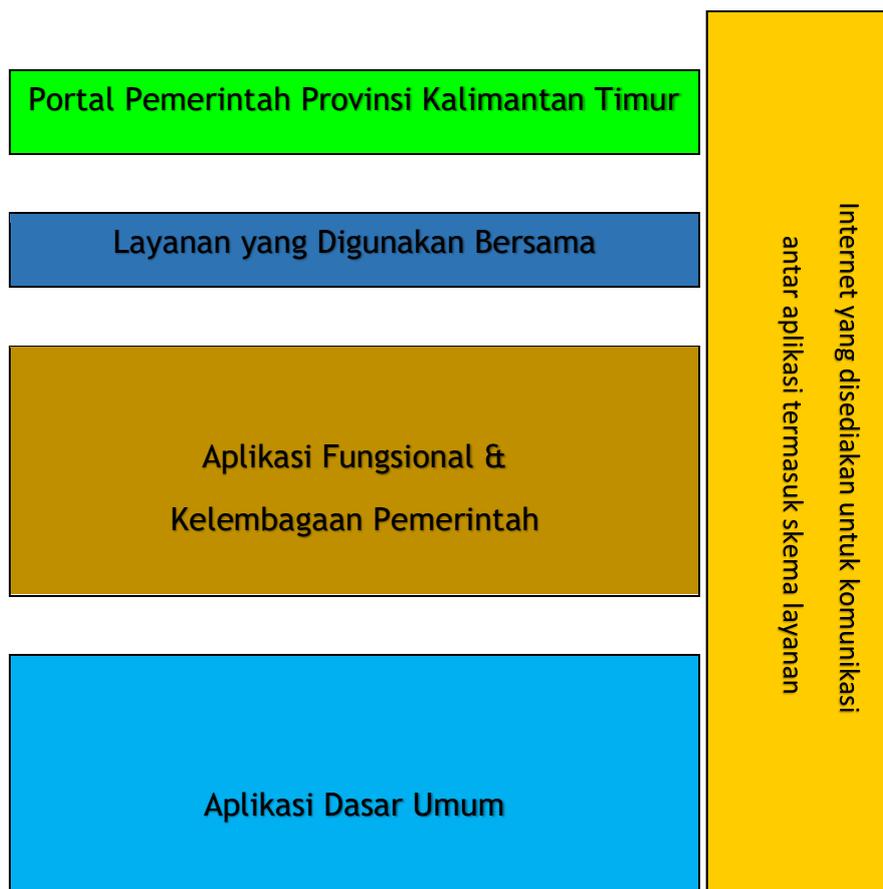
(4) Penyusunan kebutuhan infrastruktur mendatang dan perawatannya

(5) Perumusan peraturan dan kebijakan pendukung pengelolaan TIK

- (6) Penyusunan organisasi dan manajemen TIK mendatang
- (7) Penyusunan pentahapan pengembangan TIK
- (8) Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk implementasi TIK

VI. TARGET PORTOFOLIO APLIKASI

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka akan diperoleh aplikasi-aplikasi yang menjadi target untuk dikembangkan. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi: (lihat Gambar 3)



Gambar 3. Arsitektur Aplikasi

1. Aplikasi Fungsional Pemerintah, yang terdiri dari:
 - (1) Pelayanan: Sistem Informasi Pengaduan, SIM Bisnis dan Investasi, Website Seluruh SKPD, Blog Telecenter

- (2) Pembangunan: Sistem Informasi Pengelolaan Proyek, Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 - (3) Administrasi & Manajemen: E-Surat, SIM Dokumen, Sistem Pendukung Keputusan, Sistem Informasi Koordinasi Tugas, Sistem Informasi Pelaporan Daerah
 - (4) Legislasi: Sistem Administrasi DPRD, SIM Pemilu, SIM Perpu
2. Aplikasi Kelembagaan Pemerintah, yang terdiri dari:
- (1) Kepemerintahan: SIM Pendapatan Daerah (SIMPEDA),
 - (2) Kewilayahan: Sistem Informasi Geografis (SIG) Tata Ruang, SIM Potensi Daerah, SIM Pertanian, SIM Pariwisata, SIM Koperasi dan UKM
 - (3) Kemasyarakatan: SIM Kesehatan, SIM Akreditasi Sekolah, SIM Tenaga Kerja, SIM Industri dan Perdagangan, SIM Jaring Pengaman Sosial,
 - (4) Sarana dan Prasarana: Sistem Informasi Geografis Jalan dan Jembatan, Sistem Informasi Manajemen Sarana Umum

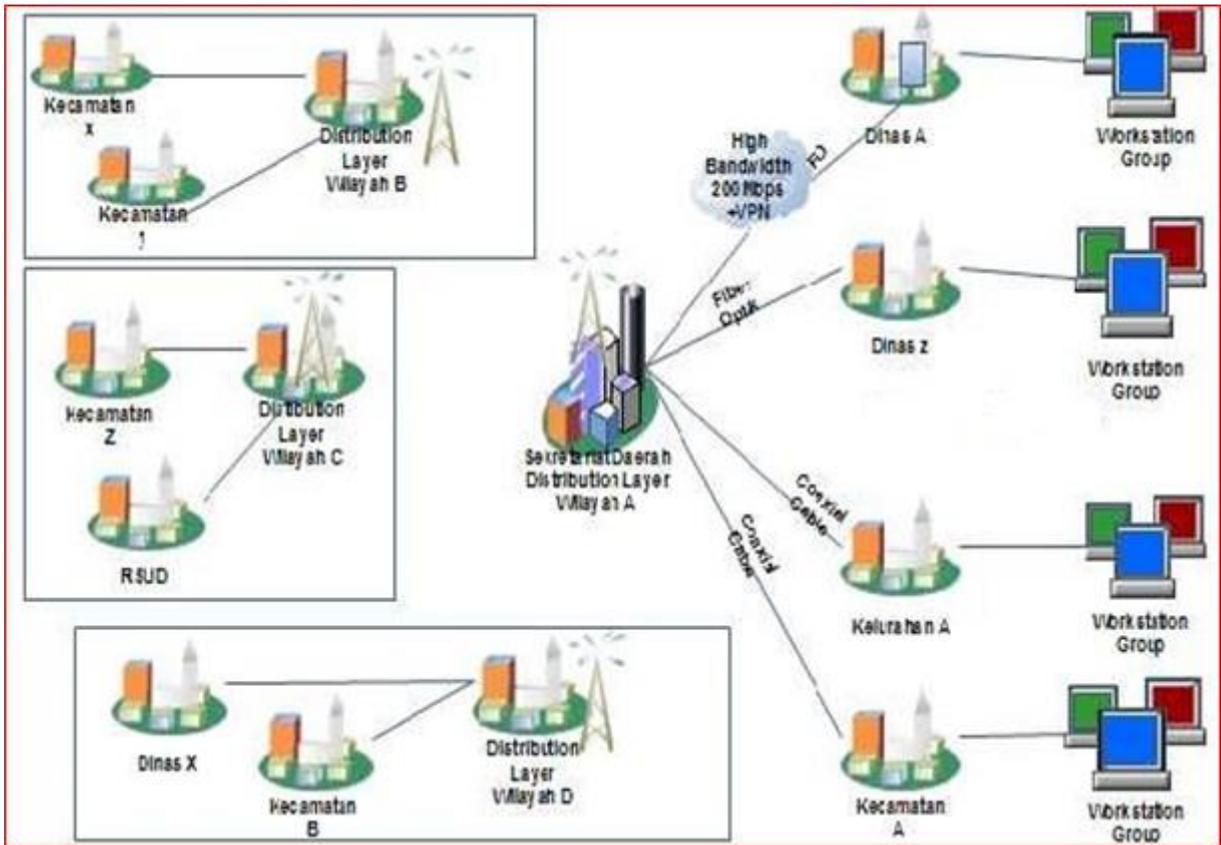
VII. INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA

Tahapan pengembangan infrastruktur TIK adalah sebagai berikut:

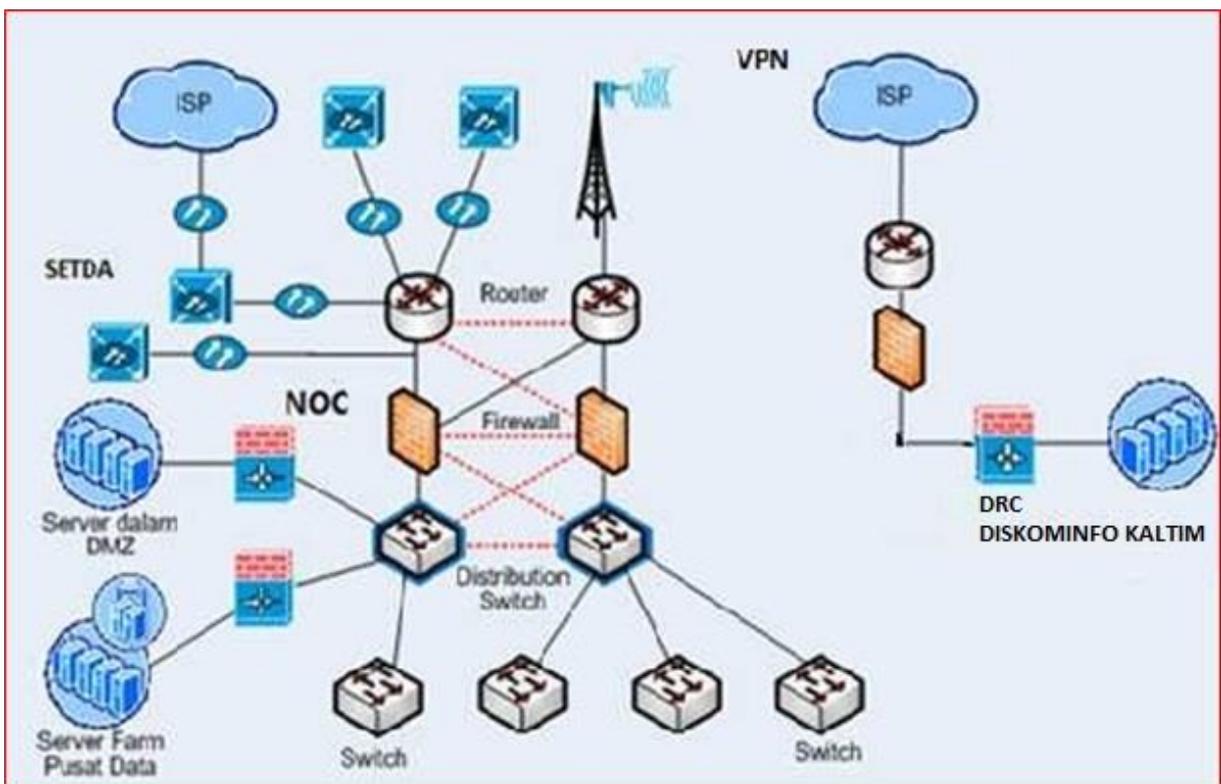
- a) Pada Tingkat Persiapan tahapan pengembangan infrastruktur jaringan dibagi menjadi beberapa kegiatan antara lain adalah :
- ✦ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus segera mengadakan pembaharuan MoU dengan pihak penyedia jasa layanan Internet (*Internet Service Provider*), dengan menyewa *Bandwith* secara terpusat beserta dengan management dan pendistribusiannya pada tiap-tiap SKPD , dengan *Bandwith* minimal 200MBps;
 - ✦ Membangun jaringan *backbone* dengan *Fiber Optic* (FO) untuk wilayah Samarinda. SKPD yang harus terhubung dengan FO adalah dinas yang memegang peranan penting dalam memegang fungsi bisnis pemerintahan atau bisa disebut dengan *Core Business* Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - ✦ Membangun pusat data (*Data Center*) secara terpusat yang bertempat di Gedung Sekretariat Daerah - Samarinda, dengan pertimbangan jika Pusat Data di tempatkan di wilayah yang sama dengan Pusat Pemerintahan

diharapkan data dapat diakses secara cepat dan efisien. Standart Tier yang digunakan untuk membangun data center pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur minimal adalah Tier 3, Level Tier 3 (tiga) ada pada level “*Concurently maintable*” . Dengan asumsi Data Center yang dibangun bersifat Moduler dan akan terus berkembang sampai pada Tier 4.

- b) Pada Tingkat Pematangan tahapan pengembangan infrastruktur jaringan dibagi menjadi beberapa kegiatan antara lain adalah :
- ✦ Pembangunan empat tower untuk komunikasi data yang dibagi menjadi empat area distribusi yaitu Distribusi layer A, Distribusi layer B, Distribusi layer C, dan Distribusi layer D;
 - ✦ Penyediaan perangkat jaringan TIK pada setiap SKPD Provinsi Kalimantan Timur, hingga Kecamatan dan kelurahan/desa;
 - ✦ Penambahan Kapasitas Bandwith dari 200Mbps menjadi 300Mbps dan dengan asumsi tiap-tiap SKPD mampu mengelola jalur VPN secara mandiri.
- c) Pada Tingkat Pematapan tahapan pengembangan infrastruktur jaringan dibagi menjadi beberapa kegiatan antara lain adalah:
Pembangunan *Disaster Recovery Center* (DRC) di Samarinda, tepatnya digedung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dengan melakukan *Collocation server*.
- d) Pada Tingkat Pemanfaatan tahapan pengembangan infrastruktur jaringan dibagi menjadi beberapa kegiatan antara lain adalah :
- ✦ Pembangunan telecenter untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - ✦ *Maintenance* (Perawatan) pada Jaringan TIK yang sudah dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mulai *core layer* hingga pada *distribution layer*.



Gambar 4 . Design Arsitektur Jaringan & Komunikasi Antar SKPD



Gambar 5. Topologi Jaringan Alternatif dan DRC

VIII. PERAWATAN

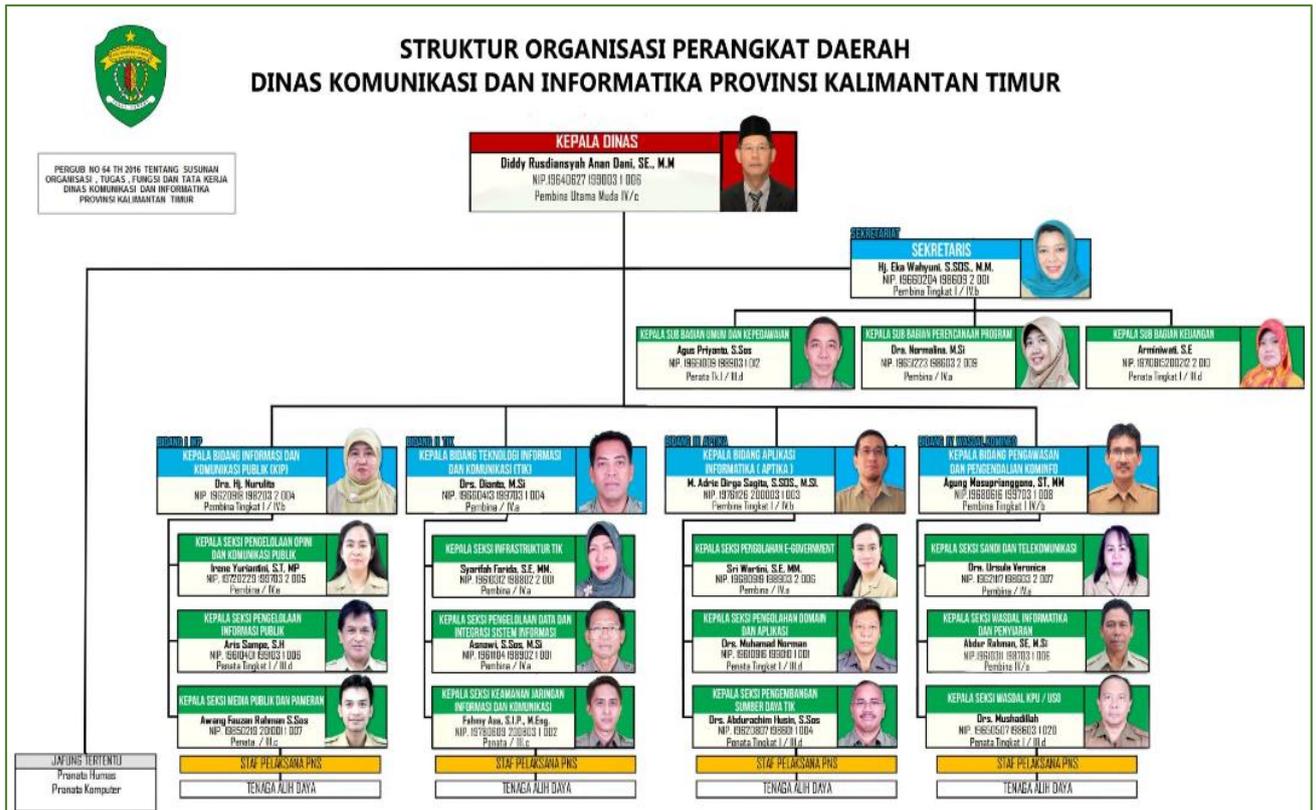
Pemeliharaan Infrastruktur untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun dibagi menjadi empat tingkatan yaitu :

1. Tingkat Persiapan
2. Tingkat Pematangan
3. Tingkat Pemantapan
4. Tingkat Pemanfaatan

IX. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka:

- ✦ Melaksanakan Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Tahun 2007 tentang Struktur dan Peran Tata Kelola;
- ✦ Mempertimbangkan volume kerja yang kian besar dan peran unit Komunikasi dan Informatika yang kian strategis;
- ✦ Mengantisipasi tren penerapan *e-government* di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala, dan
- ✦ Mendukung keberhasilan implementasi Rencana Induk TIK (Master Plan e-Government) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

X. PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Guna menjamin pengelolaan selama pengembangan dan operasional *e-government*, perlu dibuatkan peraturan dan kebijakan tentang tata kelola teknologi informasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada proses:

1. *Plan* dan *Organise*, antara lain: menentukan rencana strategis TI, arsitektur informasi, arah teknologi, proses TI, organisasi dan hubungannya, mengelola investasi TI, arahan dan tujuan manajemen komunikasi, mengelola SDM TI, mengelola kualitas, mengukur dan mengelola resiko, serta mengelola proyek
2. *Acquire* dan *Implement*, antara lain: identifikasi solusi otomatis, memperoleh dan memelihara perangkat lunak/aplikasi, memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi, mampu mengoperasikan dan menggunakan.
3. *Deliver* dan *Support*, antara lain: mendefinisikan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola layanan pihak ketiga, mengelola kinerja dan kapasitas, menjamin keberlangsungan layanan, menjamin keamanan sistem,

mengidentifikasi dan mengalokasikan dana, mendidik dan melatih staf/ pengguna, mengelola meja layanan dan pengaduan (*helpdesk*), mengelola konfigurasi, mengelola masalah, mengelola data, mengelola lingkungan fisik dan mengelola aspek operasional.

4. *Monitor* dan *Evaluate*, seperti: memantau dan menilai kinerja TI, memantau dan mengevaluasi kendali internal, menjamin kesesuaian aturan, menyediakan tata kelola TI.

XI. PENDANAAN

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di atas, biaya pengembangan *e-government* terdiri atas 3 komponen, yaitu infrastruktur, pelatihan, dan pengembangan aplikasi. Ketiga komponen tersebut tersebar pada 4 tahapan pengembangan yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Rencana Induk TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

PERKIRAAN BIAYA IMPLEMENTASI TI SELAMA 5 TAHUN (Rp.)

Komponen			Manajemen	Aplikasi	Pelatihan	Infrastruktur	Total
BIAYA IMPLEMENTASI	THN I	I	35.375.000	400.000.000	1,230,375,000	1,230,375,000	1,230,375,000
		II	38.250.000	700.000.000	1,548,250,000	1,548,250,000	1,548,250,000
		III	61.875.000	300.000.000	2,936,875,000	2,936,875,000	2,936,875,000
		IV	54.000.000	200.000.000	2,809,000,000	2,809,000,000	2,809,000,000
	THN II	I	9.875.000	260.000.000	2,673,375,000	2,673,375,000	2,673,375,000
		II	59.500.000	170.000.000	2,663,000,000	2,663,000,000	2,663,000,000
		III	56.000.000	170.000.000	889,500,000	889,500,000	889,500,000
		IV	19.750.000	200.000.000	873,250,000	873,250,000	873,250,000
	THN III	I	11.750.000	300.000.000	1,990,250,000	1,990,250,000	1,990,250,000
		II	12.375.000	200.000.000	1,920,875,000	1,920,875,000	1,920,875,000
		III	19.375.000	300.000.000	2,057,875,000	2,057,875,000	2,057,875,000
		IV	33.000.000	200.000.000	1,951,500,000	1,951,500,000	1,951,500,000
	THN IV	I	40.500.000	200.000.000	1,669,000,000	1,669,000,000	1,669,000,000
		II	36.000.000	200.000.000	1,694,500,000	1,694,500,000	1,694,500,000
		III	10.375.000	200.000.000	1,648,875,000	1,648,875,000	1,648,875,000
		IV	10.375.000	100.000.000	1,538,875,000	1,538,875,000	1,538,875,000
	THN V	I	40.875.000	100.000.000	829,375,000	829,375,000	829,375,000
		II	10.375.000	100.000.000	818,875,000	818,875,000	818,875,000
		III	22.250.000	500.000.000	1,200,750,000	1,200,750,000	1,200,750,000
		IV	0	0	678,500,000	678,500,000	678,500,000
Total			581.875.000	4.800.000.000	545.000.000	27.696.000.000	33,622,875,000